

info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**



TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PUBLIK

DALAM PENGELOLAAN ASET NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

VOLUME I / EDISI III

PUBLIKASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN KEMENTERIAN KEUANGAN



Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman adalah makna dari Nilai Pelayanan dalam nilai - nilai Kementerian Keuangan yang sudah menjadi sebuah tanggung jawab sebagai seorang Aparatur Sipil Negara.

DITERBITKAN OLEH

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
Edy Gunawan

PEMIMPIN REDAKSI

Kabag Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi
Luqman Juyo Kartono

REDAKTUR PELAKSANA

Kasubbag Publikasi dan Kerjasama
Kus Purwaning Tiyas

TIM REDAKSI

Gita Putri Utami, Amalia Putri,
Fuzy Wahyudi, Jeri Martin, Ayu Damelia

REDAKTUR FOTO

Jeri Martin, Fuzy Wahyudi

DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Jeri Martin

ALAMAT REDAKSI

Gedung Djuanda 2 Lantai 17, Jl. Dr. Wahidin
Raya No. 1, Jakarta

KONTAK

@ f [pastikanasetkita](#)
www.romadan.kemenkeu.go.id
call center: (021) 2922 5922

TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PUBLIK

Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Selain itu, letak geografis negeri kita yang berada di daerah tropis juga menimbulkan potensi bencana banjir maupun kekeringan. Belum lagi keberagaman sosial masyarakat, tidak jarang dapat menimbulkan konflik sosial.

Keberadaan ini sebagai suatu fakta bahwa masyarakat dan juga ASN perlu memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kesiapsiagaan dalam mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya bencana, termasuk mitigasi dalam memberikan pelayanan publik jika terjadi darurat bencana.

Kita tentunya sering mendengar istilah tanggung jawab, yang bermakna “siap menerima kewajiban atau tugas”. Arti tanggung jawab tersebut mudah untuk dimengerti oleh setiap orang, namun belum tentu dirasa ringan untuk dilaksanakan.

Demikian pula Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ujung tombak pengelola negara. Peran ASN berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Maka, komitmen dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sudah seharusnya menjadi prioritas. Komitmen tersebut setidaknya mencakup profesionalisme dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi normal maupun kondisi darurat.

Pada edisi ini, Info PASTI menyuguhkan sekelumit kisah dinamika ASN Kementerian Keuangan untuk tetap menjaga komitmen terhadap pelayanan publik di tengah kondisi darurat yang dihadapi, sebagai bahan rujukan bagi kita semua untuk dapat diambil hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat.

Luqman Juyo Kartono

Pemimpin Redaksi

DAFTAR ISI

JELAJAH SEKITAR

- 6 Alam Nan Indah Sentani di Bumi Papua

INFO ASET

- 10 Kilas Balik: Semangat Abdi Negara
Selamatkan Aset
- 14 Amankan Aset Demi Layanan
- 16 Tak Luput Jua Dari Guncangan Alam
- 18 Pengelolaan BMN Dalam Keadaan
Darurat

INFO PENGADAAN

- 20 Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Penanganan Keadaan Darurat
- 24 LPSE Kemenkeu Mobil 2.0
- 26 *Community of Practice*

INFO REGULASI

- 28 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

30 PENGELOLAAN ASET

DAN PENGADAAN KEMENKEU

INFO KEGIATAN

- 32 Tindakan Preventif Dalam Pengadaan
Barang/Jasa
- 33 Inisiatif Kemenkeu Asuransikan
Aset Negara

KULINER

- 34 Manjakan Lidah di Kota Pendidikan

HOBİ

- 35 Berkarya Melalui Tulisan

TEKNOLOGI

- 36 Inovasi Pengelolaan Aset Negara

GAYA HIDUP

- 37 Solusi Sehat dan Mudah



JELAJAH SEKITAR

Alam Nan Indah Sentani di Bumi Papua

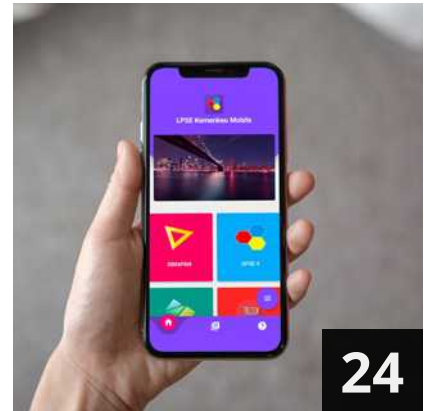
disugahi pemandangan sekitar yang alami dan eksotik danau sentani menjada daya tarik tanah papua



INFO ASET

Kilas Balik: Semangat Abdi Negara Selamatkan Aset

tetap jalankan tugas negara ditengah situasi yang tidak kondusif



INFO PENGADAAN

LPSE Kemenkeu Mobile 2.0

kemudahan akses aplikasi dan informasi pengadaan dalam genggam

ALAM NAN DAMAI SENTANI DI BUMI PAPUA

DISUGUHI PEMANDANGAN SEKITAR YANG ALAMI DAN EKSOTIK
DANAU SENTANI MENJADA DAYA TARIK TANAH PAPUA

Bentang alam indah dari barat sampai ke timur Indonesia tak akan pernah habis nampaknya. Laut biru hingga bukit indah yang memukau mata membuat pesona Indonesia semakin elok di mata dunia.

Kali ini tim Info Pasti menginjakkan kaki di bumi Papua, pulau indah di ujung timur Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa tanah Papua sangat elok dan memesona. Salah satu keindahannya terdapat di Kota Jayapura, yakni sebuah danau dengan luas 9.360 hektar dan berada di ketinggian 75 mdpl. Danau Sentani Namanya.

Danau vulkanik dengan sumber air yang berasal dari 14 sungai besar dan kecil dengan satu muara, Jaifuri Puay. Masyarakat Sentani tak hanya menjadikan danau ini sebagai sumber air, namun juga sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama mereka.

Diselimuti udara nan segar dan suguhan hijau perbukitan nan asri, menjadikan tempat ini pilihan yang tepat untuk berdiam diri sejenak mencari ketenangan. Sesuai dengan makna nama 'Sentani' yang memiliki arti "di sini kami tinggal dengan damai". Nama

ini disematkan pada danau cantik ini pertama kali oleh seorang Pendeta Kristen BL Bin pada tahun 1898.

Danau Sentani memiliki 22 pulau yang tersebar di sekitarnya. Keunikannya bisa dikatakan berbeda dari wisata Papua lainnya. Tepat sebelum mendarat di Bandara Sentani, kamu sudah bisa menyaksikan keindahan hamparan perbukitan hijau dengan Danau Sentani di tengahnya dari atas pesawat. Jika kamu ingin menikmati Danau Sentani lebih dekat, mengarungi danau ini bisa menjadi petualangan menyenangkan yang tak terlupakan.



Sentani yang memiliki arti
"di sini kami tinggal dengan damai"

JELAJAH SEKITAR

Kamu bisa menyewa perahu dari masyarakat sekitar yang sangat ramah pengunjung, lalu bersiaplah untuk menjelajahi Danau Sentani dengan diiringi hembusan angin dan alam yang syahdu.

Danau Sentani juga menjadi satu kesatuan dengan cagar alam Pegunungan Cycloops yang merupakan kawasan tadah hujan seluas kurang lebih 100km persegi. Danau terbesar di tanah Papua ini terkenal akan kekayaan alamnya yang luar biasa. Keanekaragaman hayati berupa Pohon Matoa, Pohon Pinang, maupun Kayu Putih menjadi tanaman khas yang banyak dijumpai di sekitar danau. Selain itu, Danau Sentani adalah

rumah dari 30 jenis ikan endemik, yang artinya hanya bisa ditemukan di danau ini seperti ikan gabus danau Sentani (*Oxyeleotris heterodon*), ikan pelangi merah (*Glossolepis incisus*), dan hiu gergaji (*Pristis microdon*).

Hal lain yang menarik adalah sejak tahun 2007, setiap pertengahan tahun di danau ini diadakan Festival Danau Sentani. Di festival ini, banyak sekali pertunjukan yang disajikan oleh beberapa suku asli Papua seperti tarian adat di atas perahu, tarian khas Papua, upacara adat Ondoafi, dan berbagai macam tradisi khas Papua lainnya. Selain itu, kamu juga dapat melihat pameran seni dan bermacam-macam hasil kerajinan khas Papua. Tak heran, acara ini menjadi

daya tarik utama Danau Sentani bagi wisatawan lokal maupun asing.

Bagaimana? Jadi penasaran kan untuk menikmati langsung keindahannya? Danau Sentani dengan pemandangan sekitar yang sangat alami dan eksotik ini rasanya tidak cukup kita nikmati dalam satu hari saja.

Nirwana dunia di tanah Papua menyampaikan salamnya untuk kita anak bangsa. Makna yang tersimpan di balik nama Sentani membawa pesan kedamaian yang seharusnya bisa diterapkan dalam seluruh bidang kehidupan, baik di Papua maupun di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan setiap mahakarya sang pencipta di negeri tercinta ini.



JELAJAH SEKITAR



TEKS & FOTO : JE

nirwana dunia
di tanah Papua
menyampaikan
salamnya untuk
kita anak bangsa



TEKS & FOTO : JE

pegawai Kementerian Keuangan pun bertugas mengelola barang milik / kekayaan negara

MENJAGA ASET NEGARA

Bekerja tuntas dan akurat serta penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi sudah menjadi keharusan bagi para Aparatur Sipil Negara di Kementerian Keuangan. Selain mengelola keuangan negara, pegawai Kementerian Keuangan pun bertugas mengelola barang milik / kekayaan negara. Hal ini pun yang



KILAS BALIK: SEMANGAT ABDI NEGARA TUK SELAMATKAN ASET

TETAP JALANKAN TUGAS NEGARA
DITENGAH SITUASI YANG TIDAK KONDUSIF

dilakukan oleh rekan-rekan pegawai Kementerian Keuangan jauh di Jayapura.

Pilu yang dirasa ketika mengingat kembali, hari dimana terbakarnya Gedung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jayapura, salah satu aset vital yang terletak di pelosok timur Indonesia. Kamis, 29 Agustus

2019, saat dimana Nazwar, Kepala Kantor KPPBC Jayapura bersama dengan para pegawainya dihantui rasa khawatir dan takut ketika menjalankan tugas untuk melayani masyarakat.

Mendengar kabar bahwa akan ada pergerakan massa yang akan berunjuk rasa menuju kantor Gubernur Jayapura, Nazwar menginstruksikan agar para pegawainya tidak menarik perhatian

para demonstran dan tetap berada di dalam kantor. Beberapa pegawai pun berinisiatif untuk menutup dan mengunci gerbang kantor. Demonstrasi ialah hal yang lumrah dan biasanya berjalan aman, namun tidak pada hari itu. Aksi unjuk rasa berujung ricuh, beberapa oknum massa saat itu mulai melempar bola laher dengan katapel ke arah jendela gedung kantor KPPBC Jayapura. Tak cukup dengan batu,

mereka juga melempar bom molotov, bahkan merubuhkan pagar untuk masuk dan mulai melakukan perusakan dan pembakaran gedung kantor. Akibatnya, beberapa aset tidak terselamatkan: Gedung Kantor KPPBC Jayapura terbakar, 5 kendaraan dinas terbakar, dan 18 kendaraan pribadi pegawai dirusak.

“Saya menginstruksikan agar para pegawai dievakuasi melalui pintu belakang kantor, langsung menuju pelabuhan”, jelas Nazwar saat diwawancara oleh tim Info Pasti di kantor KPPBC Jayapura. Sebanyak 16 orang pegawai, 3 diantaranya adalah wanita, berhasil dievakuasi.

Sementara itu, meskipun dalam kondisi yang genting, menjaga aset negara memang sudah menjadi tanggung jawab ASN di Kementerian Keuangan. Seperti yang dilakukan oleh dua orang pegawai KPPBC Jayapura: Benyamin Adi Ericson Billik (Erico) dan Hery Matatula. Bersama dengan dua pegawai pramubakti, mereka tanpa rasa takut kembali masuk ke dalam gedung kantor KPPBC Jayapura yang terbakar untuk mengamankan aset negara.

“Gedung kantor bagian depan sudah terbakar, kami berlari cepat menuju brankas penyimpanan senjata dan amunisi”, tutur Erico. Brankas yang

terkunci pun dengan susah payah dibuka paksa dengan linggis. Mereka berhasil menyelamatkan 19 pucuk senjata dan kurang lebih 3.000 amunisi. Menurut Erico dan Hery, melayani masyarakat harus dilakukan tanpa beban dan dengan setulus hati. Kejadian tersebut sangat terekam jelas di benak mereka dan memberikan trauma yang cukup mendalam, namun tak membuat mereka lelah untuk mengabdikan kepada Indonesia.

SITUASI TIDAK KONDUSIF, TETAP JALANKAN TUGAS NEGARA

Ketakutan dan suasana mencekam serupa dialami juga oleh rekan-rekan pegawai Kementerian Keuangan yang berkantor di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura. Kepala Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) Jayapura, Nur Hidayat, mengarahkan agar para pegawainya pulang lebih awal ketika mendengar kabar bahwa ada aksi massa yang menuju kantor Gurbenur Jayapura pada Kamis, 29 Agustus 2019. “Waktu itu sekitar pukul 1 siang, saya mendapat kabar bahwa blokade oleh aparat berhasil dijebol oleh massa”, ujarnya.

Dengan sigap, pegawai KPPN menyebarkan informasi kepada para satuan kerja bahwa layanan akan off sementara, sebelum mereka meninggalkan kantor untuk evakuasi

karena situasi yang tidak kondusif. Keesokan harinya, Nur Hidayat dan beberapa pegawai KPPN Jayapura tetap datang ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan pada hari Senin (2/9), KPPN Jayapura berinisiatif membuka layanan darurat untuk melayani satker: dengan 8 pegawai yang hadir melayani di *front office* maupun *back office*. “Mereka saling mendukung satu sama lain dan kompak. Saya sangat mengapresiasi sekali semangat mereka”, tutur Nur Hidayat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura juga berada di area GKN Jayapura. Widiyantoro, Kepala KPKNL Jayapura, mendapatkan informasi serupa mengenai aksi massa dari aparat keamanan setempat. “Jendela di depan ini pecah semua, massa tidak melempar batu dengan tangan, tetapi mereka menggunakan katapel.”, jelasnya. Aset kantor berupa laptop dan komputer yang berada di front office atau yang dekat dengan jendela diamankan terlebih dahulu untuk menghindari lemparan batu dari luar kantor. Widiyantoro juga meminta bantuan kepada aparat keamanan untuk membantu menjaga keamanan di area kantor. Namun apa daya, sekitar pukul 3 sore para demonstran mencoba masuk ke area kantor dan





Nazwar
Kepala KPPBC Jayapura



Nur Hidayat
Kepala KPPN Jayapura



Widiyantoro
Kepala KPKNL Jayapura



merusak pagar. Serentak Widiyantoro dan para pegawai Kanwil DJKN serta KPKNL Jayapura yang berjumlah 87 orang berinisiatif untuk menyelamatkan diri dengan menyusuri sungai kecil di belakang kantor dan berhasil sampai di markas marinir sekitar pukul setengah 6 sore. "Tolong jaga keselamatan, tolong jaga kekompakan, demikian pesan dari Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara", cerita Widiyantoro.

WALAU TERBATAS, SEMANGAT TETAP TANPA BATAS

Upaya-upaya untuk melayani masyarakat tetap dilakukan oleh para pegawai di berbagai unit Kementerian Keuangan Jayapura. Pelayanan terbatas tetap dilakukan, baik oleh para pegawai yang dievakuasi ke Makassar, maupun yang tetap berada di rumah dinas di Jayapura. Memberikan layanan dengan

memberikan trauma yang cukup mendalam, namun tak membuat mereka lelah untuk mengabdikan kepada Indonesia

sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan, sudah menjadi komitmen bagi mereka.

Bencana sosial ini menjadi pembelajaran dan pengalaman tersendiri bagi setiap pegawai Kementerian Keuangan di Jayapura. Rasa trauma dan memori yang membekas di benak mereka kini berangsur pulih, dengan setiap kegiatan kebersamaan yang rutin dilakukan oleh para pegawai seperti olahraga bersama, masak dan makan bersama, serta memberikan suntikan semangat kepada satu sama lain. Kekompakan yang terus dibangun tentu berdampak positif dan menjadi bahan bakar semangat setiap pegawai Kementerian Keuangan untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam mengelola keuangan dan aset negara di timur Indonesia.

AMANKAN ASET DEMI LAYANAN

MENGEMBAN AMANAH YANG MELEKAT
PASCA BENCANA YANG MELANDA

Berpredikat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang tidak bisa memilih dimana tempat mengabdikan, wajar jika terkadang ketakutan dan kecemasan melanda manakala ditugaskan di daerah terpencil atau jauh dari keluarga, apalagi saat terjadi bencana alam ataupun kerusakan di lokasi tempat kerja kita. Namun, ada satu rasa takut yang tidak boleh hilang dari ASN Kemenkeu, yakni “takut tidak bisa berbuat yang terbaik untuk negeri ini”.

Selama kurang lebih tiga tahun delapan bulan mendapat amanah menjadi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu, yakni sejak akhir tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2019, ada satu kenangan yang tak pernah penulis lupakan sampai akhir hayat nanti, yakni ketika menjadi saksi hidup terjadinya musibah yang sangat dahsyat. Hari itu, Jum'at tanggal 28

September 2018, pukul 18.02 WITA, sebagian besar warga Kota Palu, Sigi dan Donggala ditimpa tiga jenis musibah dahsyat, yakni gempa, tsunami dan likuefaksi. Likuefaksi, sebuah fenomena yang terjadi ketika tanah padat berubah wujud menjadi cairan atau air berat, merupakan musibah yang jarang sekali terjadi di dunia, apalagi di Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menceritakan secuil ikhtiar yang dilakukan dalam upaya menyelamatkan aset kantor serta layanan.

MEMUTUSKAN BERTAHAN DI BELAKANG KANTOR

Beberapa saat pasca terjadinya gempa, penulis tanpa pikir panjang langsung berangkat ke KPPN. Padahal pada malam itu suasana masih mencekam dan penuh ketidakpastian. Gempa susulan silih berganti dan aliran

listrik pun terputus. Penulis juga tidak mengerti apakah keputusan yang diambil saat itu bentuk keberanian atau kenekatan, yang jelas hanya satu keinginan yang berkecamuk di malam kejadian itu: melihat kondisi bangunan kantor dan peralatannya. Setiba di kantor, ternyata kekhawatiran penulis benar adanya. Terdapat retakan besar di teras dan halaman kantor. Pagar pengaman antara kantor dan pemukiman warga roboh. Sementara itu, pengecekan kondisi dalam kantor belum dapat dilakukan, mengingat adanya bahaya gedung runtuh seperti beberapa gedung lain di sekitar. Akhirnya pada malam itu, penulis memutuskan untuk bertahan di halaman belakang kantor, berbaur dengan beberapa pegawai dan ratusan warga sekitar yang mencari perlindungan di sana.

INFO ASET



DI SELA MUSIBAH, MASIH BISA BERBAGI BERKAH

Esok harinya, penulis dan beberapa pegawai KPPN dan Kanwil DJPb bahu membahu untuk membuat kamar mandi, WC, tenda dan dapur umum darurat sekaligus berpatungan membeli kebutuhan makanan untuk memenuhi kebutuhan ratusan pengungsi di lokasi. Praktis kurang lebih 6 (enam)



Muntar Salim
Kepala KPPN Palangkaraya

hari sejak gempa terjadi, di tengah kondisi yang sangat terbatas, kami masih dapat bekerja sama dan berbagi dengan warga sekitar.

MUNCULNYA BERITA PENJARAHAN

Selang satu atau dua hari pasca gempa, beredar kabar tentang adanya penjarahan di toko-toko swalayan. Memang dalam kondisi bencana saat itu, penjarahan kebutuhan pokok sehari-hari di toko swalayan dianggap wajar. Namun kenyataannya, semua barang yang ada di toko swalayan disikat habis. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya penjarahan di rumah-rumah penduduk yang ditinggalkan penghuninya.

AMANKAN ASET DAN SIAPKAN LAYANAN

Aset kantor seperti komputer, *printer*, *server* dan jaringan adalah penunjang utama dalam proses bisnis di KPPN. Tak bisa dipungkiri layanan KPPN sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena tugas utamanya adalah menyalurkan dana APBN.

Dengan santernya berita penjarahan, maka kami memutuskan untuk melakukan pengamanan ekstra ketat. Satpam dan pegawai ditugaskan secara bergantian siang malam untuk menjaga area kantor, diperketat dengan adanya penulis dan beberapa pegawai yang selalu stand by di tenda belakang kantor. Beberapa minggu pasca gempa, tersiar berita bahwa aset milik IAIN Palangkaraya dan TVRI Sulteng yang berada di dekat pantai Talise dibabat habis oleh para penjarah karena seluruh pegawainya menyelamatkan diri.

Dapat dibayangkan bukan, bagaimana kalau gedung KPPN dengan kondisi

pintu yang terbuka dan pagar pengaman yang rubuh tidak diamankan? Bisa jadi hitungan minggu atau bahkan bulan, layanan baru dapat dibuka. Dampaknya tentu akan sangat terasa bagi mitra kerja KPPN.

Alhamdulillah, berkat selamatnya aset penunjang, didukung dengan bantuan tim teknis dari Kanwil DJPb dan kantor pusat, tepatnya hari Rabu, 03 Oktober 2018 atau 5 hari pasca gempa, kami mulai membuka layanan darurat di lapangan parkir motor belakang kantor. Keesokan harinya, kami sudah dapat menerbitkan beberapa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), salah satunya adalah tunjangan kinerja untuk 1700 prajurit Korem Tadulako.

Demikian secuil kisah penyelamatan aset dan layanan di tengah ancaman bencana. Kami yang terlibat tidak ingin menuntut apapun atas semua yang dilakukan. Satu hari pasca gempa, sebenarnya kami ditawarkan untuk evakuasi ke tempat aman atau pulang ke kampung halaman. Namun sebagai ASN Kemenkeu yang dibekali nilai-nilai positif seperti integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, kami lebih memilih bertahan untuk satu amanah mulia yang melekat di ASN Kemenkeu: menjadi pelayan yang terbaik bagi masyarakat.

TEKS: MUHTAR SALIM
FOTO: FUZY

TAK LUPUT JUA DARI GUNCANGAN ALAM

ASET KITA DI TANAH PALU DAN DONGGALA



Palu dan Donggala, 28 September 2018, menjadi saksi peristiwa bersejarah dan penuh duka. Sore itu pukul 18.02 WITA, terasa guncangan gempa bumi yang dahsyat berkekuatan 7,4 Skala Richter yang terus mengguncang tanah Palu dan Donggala selama kurang lebih 2 menit. Tak berakhir di situ, bencana ini kemudian disusul dengan gelombang tsunami yang menghantam sejumlah kawasan. Salah satu kantor vital Kementerian Keuangan di Sulawesi Tengah, Pangkalan

Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan (PSO BC Pantoloan), pun tak luput dari bencana tersebut. Guncangan yang kuat dan terjangan gelombang tsunami yang begitu dahsyat membuat kerusakan yang cukup parah terhadap beberapa sarana dan prasarana kantor.

Demi menjaga semangat dan motivasi para pegawai PSO BC Pantoloan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara (Kanwil DJBC Sulbagtara), Cerah Bangun,

turun langsung ke posko pengungsian PSO BC Pantoloan untuk mendampingi serta memberikan arahan dalam upaya penanganan awal pasca bencana.

Pembersihan dan pemulihan sarana prasarana serta pembinaan kondisi mental para pegawai yang terdampak langsung merupakan prioritas utama yang harus segera dilaksanakan. Segala daya dan upaya dikerahkan dari segenap unsur di lingkungan DJBC demi memulihkan kembali PSO BC Pantoloan.



Pemulihan dilaksanakan dari berbagai sektor, diantaranya pemulihan sarana dan prasarana seperti gedung kantor, kapal patroli, dan dermaga hingga pemulihan dari segi administratif terkait BMN, data kepegawaian, dan anggaran.

Bantuan pemulihan dengan nama "PSO Recovery Team" datang dari seluruh bidang keahlian yang dimiliki DJBC, yakni Tim Pemulihan Sarana dan Prasarana Utama dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Tim Pendataan BMN dari Bagian BMN Sekretariat DJBC, Tim Pendamping dari Kepatuhan Internal kanwil DJBC Sulbagtara, serta gabungan berbagai unsur dari Kementerian Keuangan. Tidak hanya dari lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, KPPBC, ataupun PSO BC yang lain, tim relawan juga berasal dari ex-pegawai PSO BC Pantoloan dari seluruh pelosok tanah air.



Selain bantuan berupa tenaga, bantuan materi pun terkumpul dari seluruh penjuror negeri, baik dari instansi vertikal DJBC sendiri maupun instansi lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Sumbangan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pemulihan internal PSO BC Pantoloan, namun juga didistribusikan ke masyarakat sekitar yang terdampak gempa dan tsunami.

Guncangan bencana besar ini tidak menyurutkan semangat para pegawai PSO BC Pantoloan untuk terus mengabdikan. Pada tanggal 1 Oktober 2018, dengan kondisi dan perlengkapan yang sangat terbatas, para pimpinan dan pegawai PSO BC Pantoloan tetap melaksanakan apel peringatan Hari Bea Cukai ke-72 di antara gedung kantor yang rusak.

guncangan bencana besar ini tidak menyurutkan semangat para pegawai

PENGHAPUSAN ASET NEGARA DALAM KEADAAN *FORCE MAJEURE*

PROSES INI MEMBUTUHKAN PERAN AKTIF
DARI SELURUH SATUAN KERJA

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda kota Palu serta peristiwa pergerakan masa di Papua beberapa waktu lalu membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Banyak bangunan dan infrastruktur di wilayah Sulawesi Tengah dan Barat serta Papua yang mengalami kerusakan, tak terkecuali aset milik pemerintah (Barang Milik Negara) baik berupa tanah, bangunan, jalan, jaringan dan bangunan air.

Kondisi tersebut diatas masuk dalam keadaan kahar/*force majeure*, dimana terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan

sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rusaknya BMN yang disebabkan oleh keadaan kahar tersebut tidak dapat dihindari, namun akuntabilitas pencatatannya tetap harus dijaga. Aset-aset yang rusak berat atau hilang karena keadaan kahar harus dihapuskan dari pencatatan sesuai dengan prosedur yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 pasal 47 huruf h.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari

pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Proses ini membutuhkan peran aktif dari seluruh satuan kerja (satker) kementerian/Lembaga. Berikut tahapan dari penghapusan BMN karena keadaan kahar:

INFO ASET



Aset Kemenkeu di Gedung KPPBC Jayapura

TEKS: TYAS

FOTO: JE

PENGHAPUSAN KARENA SEBAB LAIN-LAIN

No.	Tahapan	Pelaksana	Kegiatan	Dokumen	Waktu
1.	Pemohon	Pengguna Barang	Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang	Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; Fotokopi dokumen kepemilikan KIB; Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.	-
2.	Persetujuan	Pengelola Barang	Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan; Penelitian data dan dokumen BMN; Penelitian fisik, jika diperlukan.	Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui)	-
3.	Pelaksanaan	Pengguna Barang	Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN	Keputusan Penghapusan BMN	Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN
4.	Ketentuan Tambahan	Pengguna Barang	Dalam hal Penghapusan BMN dimaksud terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan Pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		-

PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT

SECARA TEPAT, CEPAT DAN TANGGAP
AGAR KEADAAN DARURAT DAPAT TERATASI DAN TERKENDALI

**BERDASARKAN PERPRES
NOMOR 16/2018 DAN PERLEM
LKPP NOMOR 13/2018**

Dalam hal terjadi keadaan darurat, pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat ditujukan agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 59 Perpres 16/2018 dan diuraikan lebih detail dalam Perlem LKPP 13/2018.

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Keadaan darurat meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak

langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Status keadaan darurat harus ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu. Keadaan tertentu merupakan suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak memperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas. Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

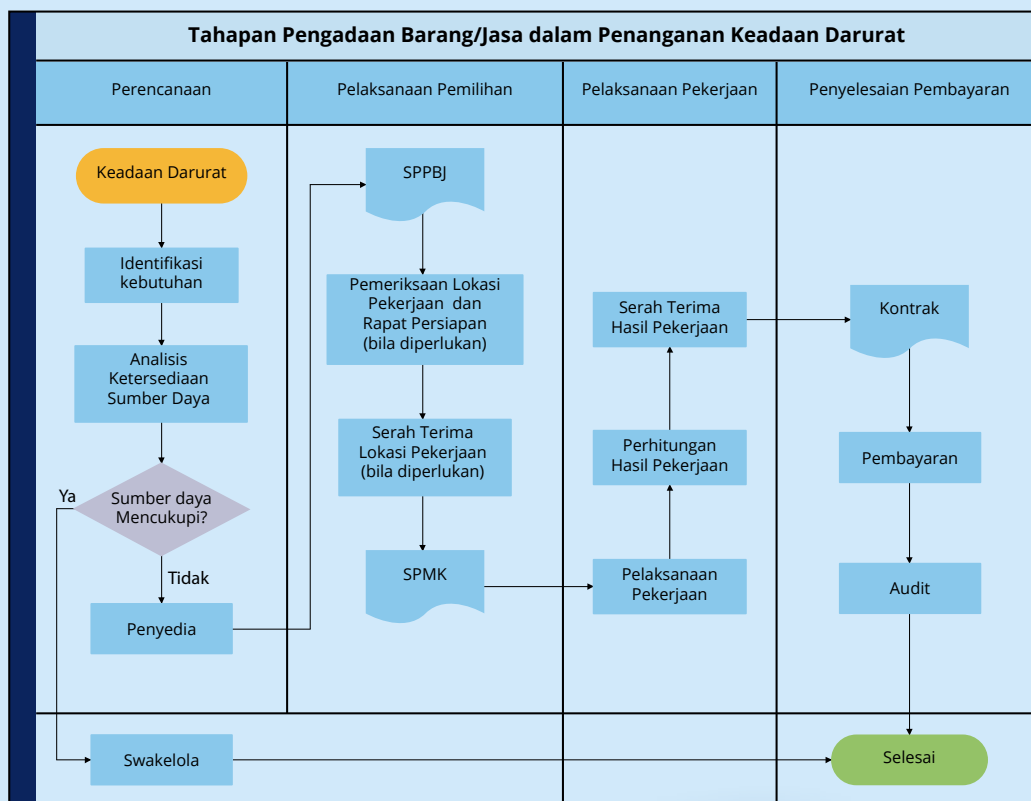
INFO PENGADAAN

Pelaku pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagai berikut:

No	Pelaku	Tugas dan Kewenangan
1	Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia; b. memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan c. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia; b. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat; c. menerbitkan SPPBJ; d. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia e. menerbitkan SPMK/SPP; f. mengendalikannya pelaksanaan pekerjaan; dan g. melakukan perikatan/perjanjian.
3	Penyedia	a. melaksanakan pekerjaan; dan b. melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT

Adapun rincian tahapan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat adalah sebagai berikut:



INFO PENGADAAN

PERENCANAAN PENGADAAN

Setelah terjadinya keadaan darurat, PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi:

a. identifikasi kebutuhan, diantaranya dengan cara:

1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan;
2. Penyelamatan dan evakuasi, diantaranya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan sebagainya.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, penampungan dan tempat hunian dan sebagainya
4. Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan; dan
5. Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/ atau mengganti kerusakan.

b. analisis ketersediaan sumber daya

c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa

1. Melalui Penyedia
Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia

2. Melalui Swakelola
Pelaksanaan Swakelola dalam penanganan darurat dilaksanakan dengan koordinasi antar pihak terkait. Pelaksanaan Swakelola dapat melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/ partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

PELAKSANAAN PENGADAAN

• Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia

- a. PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut;
- b. Apabila diperlukan, PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraan kebutuhan (jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan mengklarifikasi/ mengonfirmasi kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c. Apabila diperlukan, untuk Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;

- d. PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia;

- e. Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/ PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/ atau pengguna/penerima akhir;

- f. PPK dan Penyedia dapat bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan atau karena tujuan pekerjaan sudah tercapai;

- g. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan, PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program kegiatan;

INFO PENGADAAN

h. Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pekerjaan telah dinyatakan selesai.
2. setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima

• Pelaksanaan Pengadaan Melalui Swakelola

Pihak yang terlibat dalam kegiatan Swakelola antara lain:

- a. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
- b. lembaga nonpemerintah;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. pemerintahan negara lain atau organisasi/lembaga internasional;

- e. masyarakat; dan/atau
- f. Pelaku Usaha.

Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dan partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.

PENYELESAIAN PEMBAYARAN

- a. Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ;
- b. Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan (dalam dokumen kontrak) sebagai berikut:

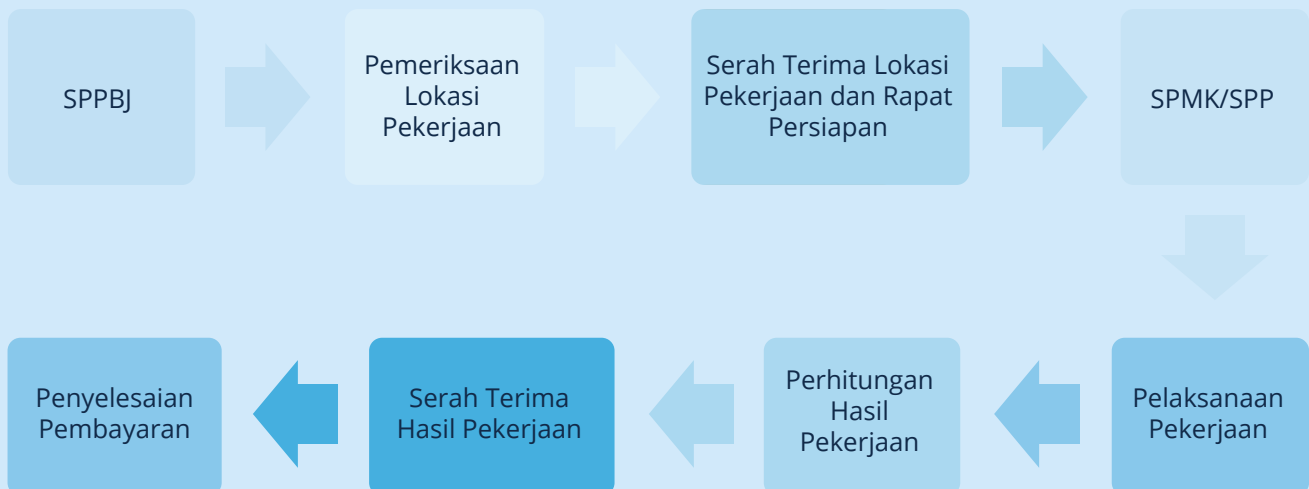
1. pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau

2. pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat.

TEKS: ACHMAD ZIKRULLAH

TAHAPAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN



LPSE KEMENKEU MOBILE VERSI 2.0

KEMUDAHAN AKSES APLIKASI
DAN INFORMASI PENGADAAN DALAM GENGGAMAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di sektor perangkat keras (*hardware*), yang sedemikian pesat memberikan dampak terhadap pengembangan perangkat lunak (*software*). Pengembang perangkat lunak saat ini memiliki keleluasaan dalam mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan. Aplikasi yang dikembangkan tidak lagi hanya dikhususkan bagi pengguna perangkat komputer seperti PC atau notebook, melainkan juga telah menysasar kepada pengembangan aplikasi bagi pengguna perangkat *mobile* seperti *handphone* atau *smartphone*.

Masyarakat saat ini sudah terbiasa mengakses sebuah aplikasi, misalnya website, melalui perangkat *mobile* yang mereka miliki. Selain itu, penggunaan perangkat *mobile* dapat membantu penggunaannya melakukan

berbagai hal seperti membaca *email*, *social networking*, menonton film, serta berbagai aktivitas lainnya.

Di samping itu, seiring dengan pertumbuhan infrastruktur internet yang semakin pesat dan harga perangkat *mobile* yang semakin terjangkau, maka aplikasi *mobile* merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat luas.

Menjawab tantangan tersebut, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mengembangkan aplikasi LPSE Kemenkeu Mobile yang saat ini sudah rilis versi 2.0 pada market aplikasi *google play store* dan telah diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal di acara *Facility Meeting Asset and Procurement Manager* Tahun 2019.

Pengembangan yang dilakukan pada LPSE Kemenkeu Mobile versi 2.0, yaitu *reengineering* aplikasi berupa perubahan *framework* yang semula menggunakan *ionic framework 2* diganti dengan *framework flutter*. *Framework flutter* adalah *framework Mobile UI* besutan *google* untuk membuat aplikasi *mobile* yang setara dengan aplikasi *native* Android maupun iOS.

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, sebagai berikut:

1. *Launcher* Aplikasi Pengadaan Merupakan fitur utama aplikasi LPSE Kemenkeu Mobile untuk mengakses aplikasi pengadaan yang dikelola dan dikembangkan oleh LPSE Kementerian Keuangan pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dalam bentuk *launcher*. Penyatuan beberapa aplikasi tersebut dalam satu tampilan aplikasi *mobile* akan

INFO PENGADAAN

sangat memudahkan bagi pengguna, karena selain akan memperoleh informasi aplikasi pengadaan secara lengkap, juga mempermudah akses menuju aplikasi tersebut.

2. LPSE News

Menayangkan berita atau informasi, aktivitas, dan kebijakan terkini terkait pengadaan di Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.

3. Fitur *Social Media*

Fitur yang digunakan untuk menampilkan halaman *social media* untuk sarana publikasi dan komunikasi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.

4. Fitur *Call Center* dan *Email*

Fitur ini memberikan kemudahan akses *Call Center* dan *Email* yang menghubungkan layanan telepon *Call Center* dan *email helpdesk* LPSE

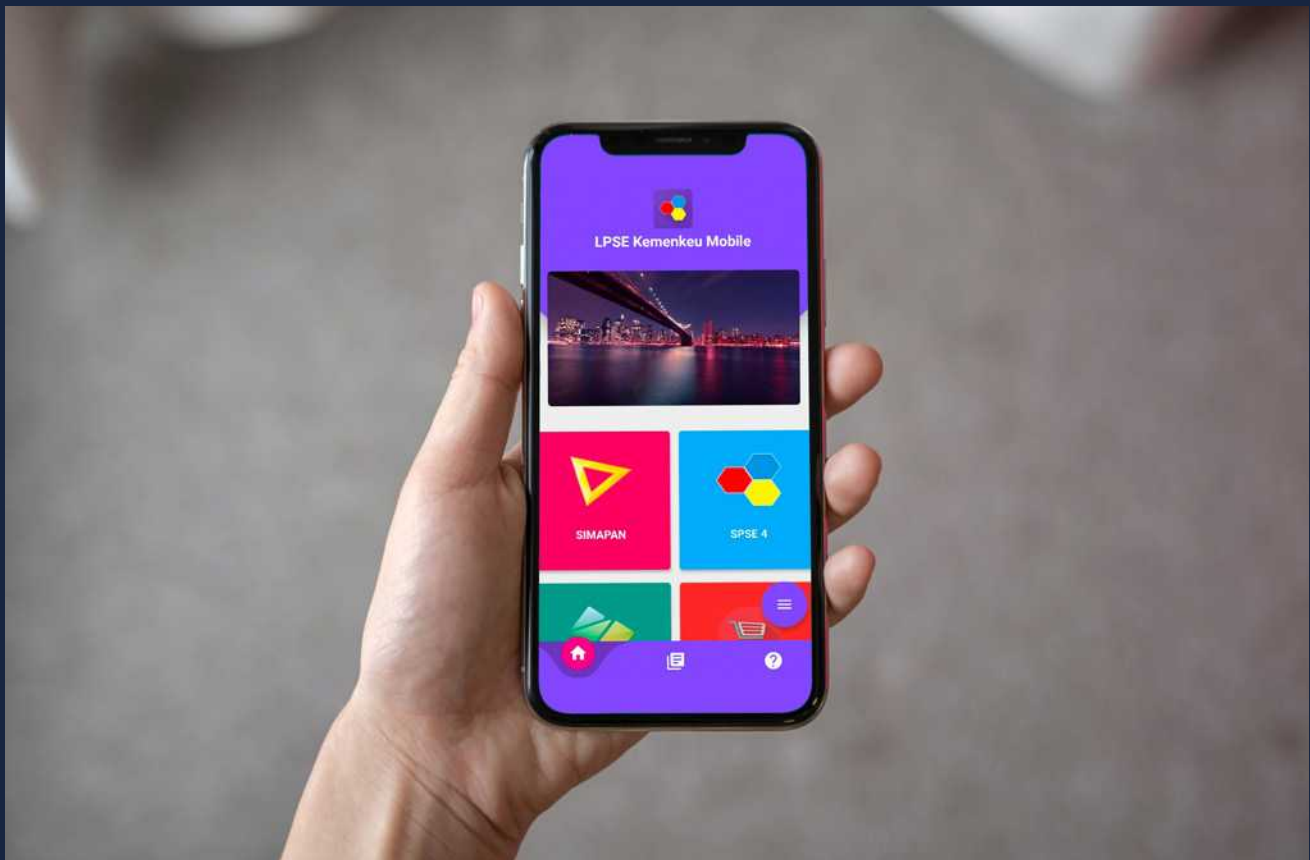
Kementerian Keuangan langsung dari *smartphone* secara otomatis.

Dengan pengembangan aplikasi LPSE Kemenkeu Mobile tersebut, diharapkan pengguna LPSE Kementerian Keuangan tidak lagi bergantung pada komputer sebagai satu-satunya sarana mengakses kebutuhan informasi dan layanan.

Cukup hanya dengan *smartphone* yang dimiliki, dapat dengan cepat dan mudah mengakses segala kebutuhan data, informasi, dan berbagai kebutuhan eksekusi aplikasi pengadaan. Walaupun tidak semua fitur aplikasi pengadaan bisa berjalan optimal pada perangkat *mobile*, sehingga ada beberapa fitur aplikasi yang masih harus dijalankan melalui perangkat desktop seperti misalnya *upload* dan *download* dokumen yang dienkripsi melalui aplikasi Apendo.

TEKS: RACHMAN SUKRI

kami dapat dengan cepat dan mudah mengakses segala kebutuhan data, informasi, dan berbagai kebutuhan eksekusi aplikasi pengadaan





COMMUNITY OF PRACTICE

Community of Practice Pengadaan Barang/Jasa (CoP-PBJ) merupakan sebuah komunitas yang berisikan sekelompok orang yang memiliki profesi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa untuk saling berbagi pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa. Membentuk dan mengembangkan CoP merupakan salah satu bagian dari strategi pengembangan *knowledge management system*.

Sementara ini anggota CoP-PBJ adalah para pelaku pengadaan barang/jasa yang terdiri dari anggota Pokja Pemilihan dan perwakilan dari beberapa pejabat dan pelaksana pada Bagian Umum/Perlengkapan masing-masing unit Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungannya masing-masing. Ke depannya, CoP-PBJ akan

para pelaku pengadaan barang/jasa yang terdiri dari anggota Pokja Pemilihan dan perwakilan dari beberapa pejabat dan pelaksana pada Bagian Umum/Perlengkapan masing-masing unit Eselon I

melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan pihak terkait lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas anggota CoP-PBJ, dilakukan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, baik yang berbentuk diklat, FGD, seminar, dan sebagainya.

Tugas dan fungsi CoP-PBJ antara lain adalah:

1. Membantu mempersiapkan perencanaan pengadaan, khususnya belanja modal konstruksi, sejak penyusunan anggaran hingga pagu ditetapkan agar terjadi percepatan dalam pelaksanaan pekerjaan tahun berikutnya;
2. Melakukan Profiling perencanaan pengadaan, diantaranya belanja modal konstruksi, khususnya untuk Paket Belanja Modal yang menjadi objek IKU Ketepatan Waktu Pelaksanaan RUP dan Paket Asistensi Belanja Modal Prioritas;
3. Monitoring dan Asistensi secara berkala atas pelaksanaan pengadaan, khususnya belanja modal konstruksi, seluruh satuan kerja di lingkup Unit Eselon I masing-masing sesuai dengan tahapan kegiatan (Penyusunan RUP,

Penyusunan RPP, Persiapan Tender, Persiapan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak, Tahapan pembayaran, dan Serah Terima Pekerjaan);

4. Melakukan pendampingan/ asistensi proses audit external (BPK) dan penanganan permasalahan hukum (legal protection).

Terdapat faktor utama keterlambatan dalam melaksanakan realisasi RUP dan membangun konstruksi fisik yaitu administrasi penyusunan RUP dan RPP yang kurang baik, manajemen implementasi RUP yang lemah, kapasitas SDM terbatas, dan *moral hazard* Penyedia. Sehingga untuk mencegah keterlambatan tersebut terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti memberikan pemahaman yang baik terkait dengan pengadaan konstruksi kepada pelaku pengadaan maupun calon pelaku pengadaan dalam hal ini dengan melibatkan CoP-PBJ pada masing-masing Unit Eselon I, memperkuat koordinasi dengan KemenPUPR/Dinas PU Provinsi dan Pemda setempat serta dengan pihak Aparat penegak Hukum (TP4P/TP4D), dan memperkuat manajerial PPK dengan membentuk Tim Teknis/Ahli (dari sisi teknis kegiatan) dan Tim Pendukung PPK (dari sisi administrasi kegiatan).

CoP-PBJ diharapkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan pengadaan barang/jasa seperti belanja modal konstruksi memiliki perbedaan karakteristik baik lokasi, besar anggaran, jenis pekerjaan, dan lain-lain sehingga membutuhkan langkah dan pendekatan yang berbeda. Jumlah belanja modal pada masing-masing Unit Eselon I akan berbeda dari tahun ke tahun yang menyebabkan profiling pada hanya berlaku untuk tahun pekerjaan dilaksanakan. Satker yang memiliki belanja modal konstruksi biasanya adalah satker yang sebelumnya belum pernah memiliki belanja modal konstruksi sehingga diperlukan pendekatan yang bersifat proaktif. Selain itu tingkat pemahaman terhadap suatu peraturan terkadang berbeda dari masing-masing praktisi sehingga diperlukan penyamaan pemahaman sebelum memberikan saran kepada subyek asistensi.

TEKS: AYUDAME

FOTO: FUZY

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

PP NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa terdapat ketentuan untuk pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). UKPBJ adalah Unit kerja di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dilakukan terpusat pada satu unit kerja yaitu UKPBJ, mulai dari fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pembinaan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan, hingga pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis.

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Romadan) ditetapkan sebagai UKPBJ di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Kepala

Romadan sekaligus ditetapkan sebagai Kepala UKPBJ melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 558/KMK.01/2019 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan.

Untuk mengatur tata hubungan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi UKPBJ selaras dengan tugas dan fungsi Romadan serta hubungan kerja dengan para stakeholder ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 572/SJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Kelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan. Tidak hanya sampai di situ, mengingat luasnya cakupan wilayah UKPBJ Kementerian Keuangan perlu ditunjuk koordinator wilayah dan koordinator kegiatan serta hubungan kerja antar bagian di Romadan perlu diperjelas maka secara teknis perlu dituangkan dalam aturan. Oleh karena itu,

ditetapkan Keputusan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan selaku Kepala UKPBJ Nomor 131/SJ.7/2019 tentang Pola Koordinasi Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan. Selanjutnya, untuk pengisian personil yang terdapat dalam struktur UKPBJ, ditetapkan Keputusan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan selaku Kepala UKPBJ Nomor 132/SJ.7/2019 tentang Penetapan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan.

TEKS: DICKY SETIAWAN

PENGHEMATAN ANGGARAN MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

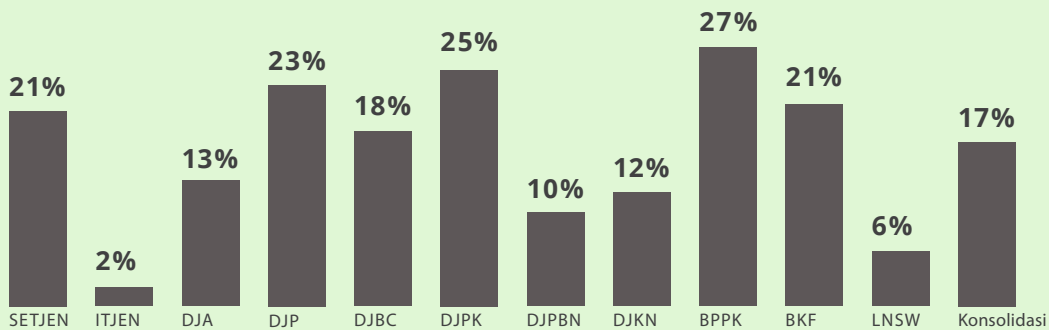
NILAI PENGHEMATAN = PAGU ANGGARAN - NILAI KONTRAK

$$\text{PRESENTASE PENGHEMATAN} = \left(\frac{\text{NILAI PENGHEMATAN}}{\text{PAGU ANGGARAN}} \right) \times 100 \%$$

PENGHEMATAN YANG DIHITUNG ADALAH PENGHEMATAN DARI PAKET LELANG YANG SELESAI DILAKSANAKAN

TOTAL PENGHEMATAN KEMENTERIAN KEUANGAN

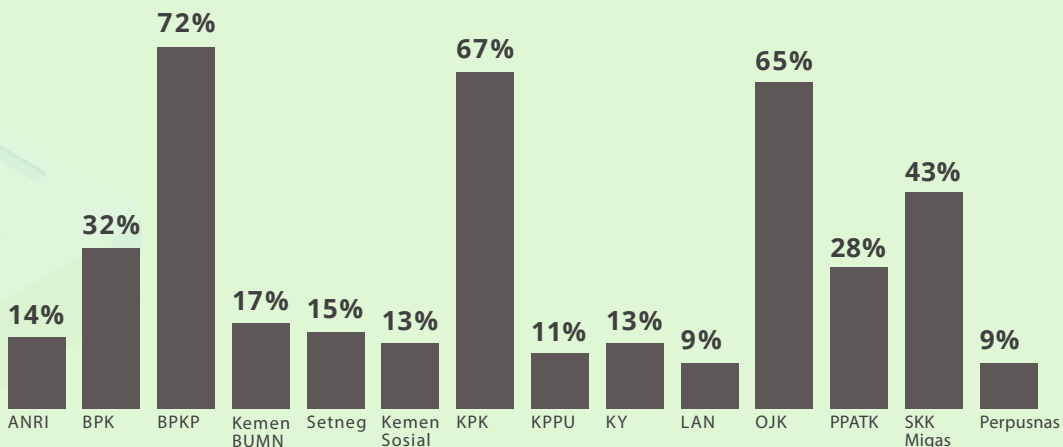
20%



TOTAL PENGHEMATAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

39%

PENGHEMATAN E-PROCUREMENT KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG BEKERJA SAMA





PR ME

professional · responsive · innovative · modern · enthusiastic

Pengelolaan BMN dan Pengadaan yang Efektif dan Efisien

PNBP dari Pemindahtanganan BMN s.d. 31 Desember 2019:

Rp16,47 miliar (446% dari target Rp3,69 miliar)

Nilai Penghapusan s.d. 31 Desember 2019: **Rp530 miliar**

(46,49% dari target Rp1,14 triliun)

Keputusan Sewa yang telah diterbitkan s.d. 31 Desember 2019

Total Keputusan Sewa: 201

PNBP dari Sewa BMN s.d. 31 Desember 2019: **Rp25,05 miliar**

(163% dari target Rp15,31 miliar)

Penetapan Status Penggunaan BMN:

429 Surat Keputusan

Penugasan Pimpinan

• **SCBD**

Tanah SCBD seluas 16.576 m2 akan digunakan oleh OJK dengan mekanisme optimalisasi penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan nomor MOU-2/MK.1/2019 dan MOU-6/D.01/2019.

• **Gedung Puskurbuk**

Proses Alih Status Gedung Puskurbuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan telah selesai dilakukan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Alih Status dengan nomor BA-61/SJ/2019. saat ini Pegawai yang sebelumnya menempati Gedung tersebut menempati Gedung Eks-Humpus (Gedung Surachman dan Lukman Hakim) sesuai dengan perjanjian penggunaan sementara nomor PRJ-17/SJ.7/2019.

• **Puri Casablanca**

27 unit Apartemen Casablanca telah dialih statuskan ke Bawaslu, 10 unit telah diusulkan untuk dialih statuskan ke kementerian ESDM, 5 unit sisanya akan dialih gunakan ke LNSW.

• **Pemanfaatan Aset di IKN Lama**

Menyiapkan analisa dan rencana optimalisasi BMN di DKI (yang ditinggalkan oleh unit-unit kerja yang direncanakan untuk pindah ke IKN Baru) (on progress karena terkait dengan masterplan DKI pasca pemindahan ibu kota dan hal-hal lain yang mempengaruhi rencana pemanfaatan BMN tersebut).

Penguatan Manajemen Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Persiapan Implementasi Asuransi Barang Milik Negara

Telah diterbitkan Polis Asuransi BMN (ABMN) dengan nomor pada tanggal 27 November 2019 yang berlaku mulai tanggal 1 s.d. 31 Desember 2019 untuk meng-cover sebanyak 1.360 unit gedung dan bangunan sebagai objek pertanggungan dengan nilai premi sebesar Rp1,77 miliar.

Peraturan dan Kebijakan

• **Selesai**

- > SE Pelaksanaan Pengadaan B/J (SE-14/MK.01/2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan)
- > SE Pemutakhiran Data dan Rencana Penggunaan/Pemakaian BMN (SE-16/MK.1/2019 tentang Pemutakhiran Data dan Rencana Penggunaan dan/atau Pemanfaatan BMN dalam Rangka Penataan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan)
- > KMK Penerapan UKPBJ (KMK-558/KMK.01/2019 tentang Penetapan UKPBJ Kementerian Keuangan).
- > SE Piloting Activity Based Workplace (SE-9/MK.1/2019 tentang Pelaksanaan Piloting ABW Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Keuangan)

- > KMK RKBMN (KMK-622/KMK.01/2019 tentang Pedoman Penyusunan Penelitian dan Penyampaian RKBMN di Lingkungan Kementerian Keuangan)
- > KMK SIMAPAN (Sistem Manajemen Informasi Pengadaan)

Terbentuknya UKPBJ Kementerian Keuangan

Pengesahan KMK 558/KMK.01/2019 tentang Penetapan UKPBJ Kemenkeu pada tanggal 10 Juli 2019

- Menetapkan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan sebagai UKPBJ
- Menetapkan Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan sebagai Kepala UKPBJ

Implementasi TCO

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah menerbitkan *Best Practice Guide* (BPG) yang dapat dijadikan acuan bagi satker-satker di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pengadaan 5 (lima) kategori barang dan bersama Pusintek telah juga mengembangkan aplikasi e-TCO yang merupakan alat yang dapat digunakan satuan kerja Kementerian Keuangan dalam menghitung analisis TCO.

Penyediaan Data BMN dan Pengadaan yang Akurat, Akuntabel, dan Berdaya Guna

- **Pembahasan** otomasi tindak lanjut Sensus BMN dan *Take-in* Revaluasi BMN
- **Sharing Knowledge** terkait akuntansi asset revaluasi BMN bersama Dit. BMN DJKN dan Dit. APK DJPB
- **Entry Meeting** Pemeriksaan Interim atas LK BA 015 TA 2019
- **Monitoring** Pelaksanaan Sensus BMN dan *updating* Master Aset

- **Monitoring dan evaluasi** pelaksanaan Sensus BMN dan *updating* master aset di Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Banda Aceh, dan Medan
- **Pembinaan** pelaksanaan sensus BMN non-KIB serta menyediakan bimbingan teknis terkait permasalahan di lapangan
- **Perbaikan revaluasi** aset Kementerian Keuangan berdampak pada naiknya nilai wajar dari Rp105,7 triliun menjadi Rp116,3 triliun (9%).

PENGELOLAAN MANAJEMEN Barang Milik Negara & Pengadaan

s.d. 31 Desember 2019

Pelayanan Publik yang Prima

Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- Call Center: 4473 orang
- Email: 3675 pesan
- WhatsApp: 3314 pesan
- FAQ: 30 pengguna
- Ruang Layanan: 1872 kunjungan
- Registrasi & Verifikasi: 620 penyedia
- Verifikasi Lapangan: 538 penyedia

Pelatihan Aplikasi SPSE dan SIMPeL untuk Penyedia

- SPSE: 326 orang
- SIMPeL: 109 orang

Paket Pengadaan Selesai s.d. 31 Desember 2019

- **UKPBJ Kemenkeu:** 507 paket, pagu Rp2,35 triliun, kontrak Rp1,88 triliun, dan **penghematan Rp470 miliar**

Perpanjangan Kerja Sama Penggunaan SPSE dengan Kementerian/Lembaga di Tahun 2019

- BPKP, LAN, dan SKK Migas.

Monev dan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa

- Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan selama kuartal IV tahun 2019 telah dilaksanakan di KPKNL Ternate, KPP Madya Semarang, KPPBC Kualanamu, dan KPPBC Kuala Langsa.
- Selama kuartal IV tahun 2019 telah dilaksanakan asistensi pengadaan barang dan jasa dengan mengunjungi 13 (tiga belas) satuan kerja, yaitu: Kanwil DJPB Prov NTB, KPPBC Mataram dan KPPN Makassar I, GKN Jayapura, Pembangunan GKN Mamuju, Kanwil DJKN Banten, KPKNL Banjarmasin, KPP Madya Semarang, Kanwil DJKN Banten, Kanwil DJP Jabar III, KPPBC Tarakan, KPPBC Kuala Langsa, KPU BC Batam, dan KPP Pratama Mataram Timur.

Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Community of Practice Pengadaan Barang/Jasa

Community of Practice (CoP) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu upaya *knowledge management* di bidang PBJ. CoP PBJ beranggotakan 1 (satu) orang Eselon IV dan minimal 4 (empat) pelaksana pada Bagian Umum/Perlengkapan masing-masing unit Eselon I yang menjadi pembina pengadaan sebagai counterpart dari Tim Asistensi dan Monitoring Belanja Modal yang ada di Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dan Tim Help Desk Inspektorat Jenderal.

Manajemen BMN dan Pengadaan

- **Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK, Pejabat Pengadaan, dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) di lingkungan Kementerian Keuangan.
- Pelatihan Pemberdayaan dan Peningkatan **Kompetensi Pembinaan Pengadaan Konstruksi**.
- *Workshop* perencanaan dan **manajemen risiko pengadaan barang/jasa** dengan peserta seluruh PPK.
- Menghadiri Seminar Nasional **Kontrak : Pemasalahan dan Solusinya** yang berlangsung di Surabaya.
- Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait **Laporan Implementasi Total Cost of Ownership (TCO)** di Lingkungan Kemenkeu

Otomasi Layanan Korporat yang Berkualitas

Dashboard Pimpinan

Agenda kegiatan, data IKU, anggaran, inisiatif strategis, DAMS, data BMN, data belanja modal, realisasi paket pengadaan, dan laporan kinerja bulanan.

Aplikasi yang Sudah Dikembangkan

- Aplikasi RP4: telah selesai dikembangkan dan telah diimplementasikan di Kementerian Keuangan
- e-Sewa BMN

Pengembangan Aplikasi

- BMN: Dashboard BMN v2 dan Sensus BMN 2019
- Pengadaan: SIMPeL v5.2, SIMAPAN v5.3, Report Pengadaan v4



Dalam rangka mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Patologi Penyimpangan serta Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kota yang mempunyai potensi kerawanan serta permasalahan terkini terkait pengadaan barang/jasa. Sosialisasi dilaksanakan di kota Jakarta (23/10), Batam (14/11), Makassar (21/11) serta Yogyakarta (28/11). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Republik Indonesia nomor MoU-4/MK.01/2019 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.

Nara sumber yang dihadirkan dalam sosialisasi tersebut adalah Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo selaku Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia. Dalam paparannya, Gatot menyampaikan materi mengenai penyimpangan serta penanganan tipikor dalam pengadaan barang/jasa serta aspek hukum pengadaan barang/jasa.

Melalui Sosialisasi ini, diharapkan agar para pengelola pengadaan barang/jasa mendapatkan wawasan baru mengenai tindak pidana korupsi (tipikor) sehingga dapat berkontribusi aktif dalam mencegah tipikor di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan ada kesamaan persepsi antara penegak hukum serta pengelola pengadaan barang/jasa dalam melihat permasalahan tipikor di bidang pengadaan barang/jasa sehingga pengelola pengadaan barang/jasa

TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

mendapatkan rambu-rambu yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, pengelola pengadaan barang/jasa dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan efektif dan efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, keuangan, dan manfaatnya dapat dirasakan bagi

INISIATIF KEMENKEU ASURANSIKAN ASET NEGARA



Dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, maka jaminan Barang Milik Negara (BMN) apabila rusak atau hilang sangat diperlukan agar pelayanan umum tetap berjalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D yang mengatur bahwa Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMN tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sebagai wujud implementasi ketentuan asuransi tersebut, Kementerian Keuangan menjadi *Pilot Project* dalam pengasuransian BMN.

Implementasi asuransi BMN dimulai dengan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kontrak payung penyedia

jasa asuransi BMN pada Senin, (18/11) di Kantor Pusat DJKN oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dengan Konsorsium Asuransi BMN. Bersamaan dengan penandatanganan kontrak payung tersebut, ditandatangani pula Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) oleh Kabiro Umum, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Sugeng Wardhoyo sebagai pihak Kementerian/Lembaga (K/L) yang melakukan pengasuransian BMN pada tahun 2019. Kontrak payung ini merupakan dasar untuk pengadaan jasa asuransi BMN di tingkat K/L. "Dengan adanya penandatanganan kontrak payung ini, maka implementasi asuransi BMN telah dimulai," tutur Isa.

Sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan *piloting* Asuransi BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan, Ketua Konsorsium Asuransi BMN,

Didit Mehta Pariadi selanjutnya menyerahkan Polis Asuransi BMN kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto pada Jumat (29/11) di Kantor Pusat Kemenkeu. "Ternyata BMN di Kemenkeu juga cukup banyak, cenderung terdampak bencana, dan tersebar di seluruh Indonesia sehingga kita mencoba memitigasinya melalui pengasuransian BMN ini," tutur Hadiyanto. Di tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mulai mengasuransikan 1.360 gedung Kementerian Keuangan dengan nilai pertanggungan Rp10,84 triliun. Selanjutnya, DJKN merencanakan untuk mengimplementasikan asuransi BMN secara bertahap di seluruh Kementerian/Lembaga.

TEKS: ANDIKA
FOTO: FUZY

MANJAKAN LIDAH DI KOTA PENDIDIKAN

RASAKAN SENSASI KULINER DITEMANI RAMAHNYA MASYARAKAT YOGYAKARTA



Dikenal sebagai Kota Pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang sering dituju para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk melihat peninggalan bersejarah dari zaman kerajaan, hingga penjajahan dan kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun, tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Yogyakarta tanpa menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner khas kota ini. Karena selain terkenal ramah, masyarakat Yogyakarta juga terhitung kreatif dalam menciptakan beragam makanan khas yang lezat untuk disantap sembari menikmati suasana malam Kota Yogyakarta.

Salah satu wisata kuliner malam yang banyak dijumpai di pinggiran kota Yogyakarta adalah gudeg, yakni olahan tradisional khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka dan biasanya identik dengan rasanya yang manis. Namun, berbeda

dengan Gudeg Mercon Ibu Tinah yang telah membuka warung tenda sejak tahun 1992. Gudeg buatan Ibu Tinah ini rasanya tidak manis, justru malah sangat pedas karena diberi banyak lombok hijau dan merah. Selain gudeg, warung Ibu Tinah juga menyediakan beragam lauk pauk sederhana untuk menjadi teman bersantap seperti ayam, burung puyuh, ceker, bihun, krecek, telur, baceman, dan gorengan. Warung Gudeg Mercon Ibu Tinah berlokasi di pinggiran Jalan Asem Gede dan buka sejak pukul 21.30 hingga 03.00 dini hari. Untuk harga, seporsi nasi gudeg ini berkisar 25-35 ribu rupiah tergantung lauk apa saja yang dipilih.

Selain gudeg, Yogyakarta juga merupakan pelopor makanan ayam geprek, santapan yang terbuat dari daging ayam goreng tepung yang kemudian diulek bersama lombok merah serta bawang putih. Salah satu warung ayam geprek yang terkenal di kota Yogyakarta ialah Ayam Geprek Bu Rum

yang telah berdiri sejak tahun 2003 ini berlokasi di Jalan Wulung Lor Papringan. Selain sambalnya, keistimewaan Ayam Geprek Bu Rum terletak pada balutan tepung renyah pada ayamnya. Seporsi ayam geprek dengan nasi dihargai Rp 12 ribu. Selain renyah, daging ayamnya juga terasa gurih karena memang sudah direndam bumbu terlebih dahulu sebelum dibalur tepung terigu.

Tak kalah enak, kuliner Yogyakarta yang wajib dicicipi oleh pecinta makanan pedas yaitu Oseng Mercon Bu Narti yang berlokasi di Jalan K. H. Ahmad Dahlan. Bahan utama untuk membuat oseng-oseng ini ialah kikil, gajih, daging sapi, dan bumbu tumisan yang digoreng dalam minyak yang berlimpah. Masakan ini juga tidak memakai kecap dan merica karena rasanya bisa berubah.

Jika kamu ingin mencicipi ketiga kuliner khas Yogyakarta ini, jangan lupa untuk datang lebih awal supaya tidak mengantre lama, ya!

TEKS & FOTO: AYUDAME



Menulis umumnya dipandang sebagai sebuah hobi ataupun profesi. Namun, bagi saya pribadi, menulis saya anggap sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan yang dimulai sejak saya menikmati momen terbenam dalam imaji dari sebuah buku. Melalui membaca, saya jatuh hati dengan bagaimana sebuah pemikiran ataupun perasaan bisa terbungkus dengan apik dalam rangkaian permainan kata. Akan tetapi, mengubah hobi membaca menjadi semangat untuk menulis bukan hal yang terjadi dengan sendirinya. Hingga sampai di titik ini, saya menyadari ada beberapa hal penting yang dibutuhkan untuk memulai menulis.

BAGAIMANA MEMULAINYA?

Meningkatkan *awareness* akan lingkungan sekitar. Bagi kebanyakan orang, kesulitan terbesar dalam menulis adalah menemukan inspirasi. Padahal sebenarnya, inspirasi ada dibalik semua benda, semua kejadian, dan semua hal yang sedang terlintas di dalam benak. Yang diperlukan adalah kepekaan dalam menangkap hal-hal kecil yang terjadi di sekitar dan kreativitas untuk mengemasnya menjadi sebuah tulisan yang bermakna.

MENETAPKAN TUJUAN

Banyak tujuan yang ingin dicapai dari sebuah tulisan. Sebagian orang menulis untuk mengungkapkan perasaan, sebagian untuk menuangkan gagasan. Ada yang menulis untuk berbagi pengalaman dari sebuah peristiwa di masa lampau, ada yang menulis untuk menceritakan hal-hal yang baru saja ditemukan. Beberapa tulisan digunakan untuk menghibur, tak jarang pula tulisan mengandung kritik. Apapun tujuannya, pastikan seluruh ide yang akan dituangkan mengandung perspektif dan nilai untuk dibagikan kepada orang lain. Dengan demikian, menulis akan menjadi lebih mudah dan terarah.

MENCARI PERSPEKTIF YANG BERBEDA

Di tengah era digital, semua orang terpapar oleh akses informasi yang bebas dan tidak terbatas. Semakin mudah mencari bahan yang dapat

digunakan untuk menulis. Namun di sisi lain, semakin sulit menemukan hal-hal yang belum terekspos. Agar tetap dapat menciptakan tulisan yang menarik, kita harus terus belajar untuk mencari perspektif yang berbeda dengan opini-opini yang beredar pada umumnya. Selalu mencari perspektif baru juga sejatinya membantu meningkatkan *curiosity* dalam diri kita, dan memotivasi kita untuk lebih banyak membaca, serta mengobservasi.

Beberapa hal yang saya sebutkan diatas hanyalah sedikit dari banyak cara yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang yang sedang bingung untuk mulai menulis. Terlepas dari tiga hal tersebut, tentu saja hal yang terpenting adalah keberanian untuk memulai dan mengapresiasi setiap tulisan yang dibuat.

BERKARYA MELALUI TULISAN

HAL YANG PALING PENTING ADALAH
KEBERANIAN UNTUK MEMULAI



INOVASI PENGELOLAAN ASET NEGARA

APLIKASI RENCANA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN (RP4)

TEKS: ADITYA NUGROHO

Dinamika Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terus berkembang. Mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel harus dilakukan dengan *continuous improvement* dan sinergi positif. Tidak dapat dipungkiri bahwa simplifikasi dalam pengelolaan BMN sangat diperlukan di era perkembangan teknologi. Dengan semangat untuk mempermudah proses pengelolaan BMN, dibuatlah aplikasi Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4).

UPAYA OPTIMALISASI BMN

Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan BMN, salah satunya dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 855/KM.1/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka transformasi digital yang saat ini sedang digalakkan Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mengembangkan aplikasi untuk mempercepat proses percepatan

penyampaian rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang disebut aplikasi RP4. Aplikasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2019 dan mulai digunakan secara efektif oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2019. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses bisnis dan *monitoring* penyusunan RP4. Kedepannya, aplikasi RP4 akan dikembangkan dengan berbasis web sehingga data akan dapat dimonitor secara *real time*.

FITUR PADA RP4

Aplikasi RP4 memudahkan satker dalam menyampaikan rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan sehingga satker hanya perlu menginput rencana untuk tiga tahun mendatang dan mengirim Arsip Data Komputer (ADK) ke koordinator wilayah melalui aplikasi ini. Begitupun koordinator wilayah mengirimkan ADK ke kantor pusat melalui aplikasi sehingga proses pertukaran data dapat berlangsung lebih cepat.

Terdapat tiga *role user* pada Aplikasi RP4:

1. User UAKPB (Satuan Kerja)

2. User UAPPB (Kantor Wilayah)

3. User UAPPB (Koordinator Eselon 1)

SOSIALISASI RP4

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan juga telah mengadakan sosialisasi aplikasi RP4 di beberapa Kantor Wilayah Kementerian Keuangan. Sosialisasi ini memaparkan pokok-pokok kebijakan dalam penyusunan RP4 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 855/KMK.01/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan bimtek penyusunan RP4 BMN dengan aplikasi RP4, menggunakan data SIMAN di masing-masing Satker sekaligus evaluasi implementasi RP4 BMN.

Untuk mengunduh Aplikasi RP4 beserta manual tata cara penggunaan lengkapnya, silakan mengakses alamat bit.ly/rp4-romadan. Sedangkan update aplikasi terbaru dapat diunduh pada alamat bit.ly/update-rp4. Dinamika Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terus berkembang.

Di tengah cuaca dan gaya hidup masa kini, sudahkah kamu melakukan *medical check-up*?

Bagaimanapun hasilnya, dokter pasti menyarankan agar kamu menyempatkan diri untuk berolahraga. Olahraga yang rutin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat dan fit untuk beraktivitas. Permasalahannya, bagaimana kamu bisa berolahraga kalau keseharianmu didominasi jam kerja di kantor? Jangan khawatir, ada kok olahraga murah meriah yang bisa diselipkan disela-sela kesibukan kantor, yaitu lari atau *jogging*. Kamu bisa lari di pagi hari sebelum masuk kerja atau di sore hari setelah selesai jam kerja. Tempatnya bisa di *jogging track* yang sudah banyak tersedia, di lapangan olahraga, di taman kota, atau bahkan di trotoar jalan di sekitar kantor atau rumah. Tapi ingat, kamu tetap harus berhati-hati ya.

Mulailah dengan pemanasan agar aliran darah ke otot lancar dan ketegangan otot berkurang. Setelah itu, lanjutkan dengan lari-lari kecil sambil mengatur napas. Kalau napasmu sudah mulai terasa berat, kurangi kecepatanmu. Pengaturan pernapasan ini penting untuk membantu kinerja jantung dan paru-paru. Jangan lupa bekal air minum yang cukup untuk menghindari terjadinya dehidrasi.

Selain otot-otot kaki yang bekerja, saat kita berlari jantung juga giat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan

nutrisi dan oksigen bagi seluruh tubuh. Jika rutin dilakukan, tentu jantung kita akan terlatih untuk bekerja dengan baik dan lebih sehat. Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik, berlari juga ternyata memberikan efek baik bagi kesehatan mental. Olahraga lari dapat memperbaiki kualitas tidur, mengurangi depresi, menghilangkan rasa cemas, meningkatkan semangat bekerja, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Untuk mendapatkan pengalaman berlari yang nyaman dan aman, ada baiknya kamu menggunakan sepatu khusus untuk lari yang memiliki sol empuk dan lentur. Selain nyaman, sepatu lari yang tepat juga dapat mengurangi resiko cedera, baik pada pergelangan kaki, lutut, tulang belakang, dan pinggang.

Selain rutin berlari, kamu juga bisa mengikuti *event-event* lari yang sedang berlangsung di sekitar kita, misalnya di acara *car free day* yang minim polusi udara. Kemudian ada juga event yang memang **dikhususkan** untuk berlari dengan kelas jarak yang beragam yaitu 5km, 10km, half marathon (21,1km), dan marathon (42,2km). Di Kemenkeu sendiri, setiap tahunnya diselenggarakan Oeang Run sebagai bagian dari perayaan Hari Oeang. Kita tidak perlu minder untuk mengikuti event lari. Dari yang pemula sampai yang profesional semua mempunyai kesempatan yang sama, tujuan yang sama, saling respek, dan yang paling utama: *have fun, have a run!*

TEKS: FUZY
FOTO: JE

SOLUSI SEHAT DAN MUDAH

OLAHRAGA YANG RUTIN BISA MENJAGA TUBUH AGAR TETAP SEHAT DAN FIT UNTUK BERAKTIVITAS.



INFO LAYANAN

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

REGISTRASI & VERIFIKASI

Layanan aktivasi user id dan password bagi penyedia yang mendaftar dalam aplikasi SPSE dan SIMPeL.

SPSE: lpse.kemenkeu.go.id

SIMPeL: simpl.lpse.kemenkeu.go.id

HELPDESK

Layanan bantuan bagi satuan kerja dan penyedia terkait aplikasi SPSE dan SIMPeL.

Call Center: 021 2922 5922

Email: lpse@kemenkeu.go.id

WhatsApp: 0852 1740 4522

KONSULTASI

Solusi teknis untuk permasalahan BMN dan permasalahan pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja.

ASISTENSI

Asistensi dan pendampingan pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja.

PELATIHAN APLIKASI

Pelatihan penggunaan aplikasi SPSE dan SIMPeL bagi penyedia dan satuan kerja.

SPSE : Selasa • 09.00 WIB

SIMPeL: Rabu • 09.00 WIB



Untuk **pendaftaran pelatihan** silahkan kunjungi tautan berikut:
tinyurl.com/registrasipelatihanpenyedia



"Bolak-Balik"



info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**